

UPAYA PENINGKATAN SEKTOR KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA DAMAI DI BALI

IMPROVEMENT ENDEAVOR OF SAFETY AND SECURITY SECTOR IN REALIZING PEACE TOURISM IN BALI

I Made Raditya Suputra Sanjaya¹, I Gede Sumertha KY², Wayan Nuriada³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan

Email: made.sanjaya@mail.ugm.ac.id, gedesu16@yahoo.com, wnuriada@gmail.com

Abstrak - *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)* memposisikan Pariwisata Indonesia pada peringkat ke-42 dari total 136 di tahun 2017. Peringkat tersebut terdiri dari 14 indikator, yang salah satunya adalah keamanan dan keselamatan. Pariwisata Indonesia menemui permasalahan di sektor ini dengan realitas peringkat yang buruk selama sepuluh tahun terakhir. Bali merupakan provinsi dengan proporsi penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata. Maka, upaya peningkatan sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali menjadi fokus utama dalam penelitian. Permasalahan penelitian berupa kondisi sektor keamanan dan keselamatan pariwisata di Bali dan upaya peningkatan sektor ini untuk mewujudkan perdamaian. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik hermeneutika deskriptif fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat kerugian akibat aksi kekerasan dan aksi terorisme yang meskipun terjadi di luar Bali, akan tetap memengaruhi wisatawan terhadap jaminan bebas dari ancaman. Upaya peningkatan telah dilaksanakan pihak Polda Bali berupa pembentukan *Foreigners Community Club (FCC)* sebagai langkah preventif terhadap aksi kriminal sektor pariwisata. Terdapat juga peningkatan fungsi pecalang dan desa adat sebagai upaya cegah dini. Relasi antar manusia dalam pariwisata terkait kondisi aman dan ancaman adalah produk manusia itu sendiri. Para pelaku kekerasan sektor pariwisata dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonominya di samping fenomena alienasi subjek yang mengarah pada perilaku destruktif. Terwujudnya perdamaian pariwisata Bali dapat terjadi pada saat manusia Bali tetap memegang teguh pariwisata berbasis budaya.

Kata Kunci: Keamanan dan keselamatan pariwisata, Bali, perdamaian.

Abstract - *World Economic Forum (WEF)* consistently evaluates tourism developments worldwide, including Indonesia. The forum applies *Travel and Tourism Competitiveness Index* and ranks Indonesian tourism in 42th place of 136 in 2017. The rank consists of 14 indicators, and the essential one is defense and security. In the indicator mentioned, Indonesian tourism is always on the bottom

¹ Mahasiswa pascasarjana strata dua, program studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Dosen Tetap Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Kepala Pusat Relevansi dan Manajemen Pendidikan, Universitas Pertahanan.

of the list in the last ten years. For Bali is a province with the biggest annual foreign exchange revenue in tourism, the research chooses Bali to find out the source of the problem and devise the best method to improve national indicator of defense and security in tourism. The research uses qualitative research. Data are collected from selected informants and analyzed using descriptive-phenomenological hermeneutics. The research shows that the movement of violence and terrorism taking place within and outside Bali affect tourism free from threat status. Improvements have been conducted by the Bali Police with creating Foreigners Community Club as a preventive method toward crime in tourism. Moreover, maximalizing the role of the traditional village and *pecalang* also has been performed as pre-prevention. However, the relation among humans in the tourism regarding free from threat condition is the product of humanity itself. The criminals in tourism are influenced by socio-economic factors and from alienation problem leading to destructive actions. Peace can be realized in Bali when Balinese can hold strongly tourism based on local cultures.

Keywords: *Tourism Safety and Security, Bali, Peace.*

Pendahuluan

Tahun 2019 Industri Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia yaitu US\$ 24 Miliar, melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Kelapa Sawit. Dampak devisa dari pariwisata yang masuk, kemudian dapat langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.⁴ Eksistensi pariwisata tersebut memiliki pengaruh secara langsung terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan sektor lainnya seperti politik, sosial, budaya, lingkungan, tingkat kesejahteraan, keamanan, hingga perdamaian. Pemerintah Indonesia

selanjutnya harus memperhatikan pelbagai masalah yang terdapat di sektor pariwisata. Perkembangan Pariwisata Indonesia berdasarkan data laporan dari *World Economic Forum*⁵ yakni *Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Edition*⁶, memperoleh peringkat ke-42 dari 136 negara di dunia. Peringkat tersebut memang terlihat meningkat dibandingkan capaian pada Tahun 2015 yang mana Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara di dunia. Total nilai (score) pariwisata Indonesia

⁴ Lih. Kurnia Sari Aziza, "Pariwisata Diprediksi akan jadi Penyumbang Terbesar Devisa Indonesia", dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/052923826/pariwisata-diprediksi-akan-jadi-penyumbang-terbesar-devisa-indonesia> diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 09:54 WIB.

⁵World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) merupakan lembaga/ organisasi internasional independen yang didirikan di Jenewa, Swiss pada tahun 1971. Forum ini digunakan sebagai titik pertemuan para praktisi dunia, mulai dari pemerintah, cendekiawan, hingga pelaku bisnis dunia. Pelbagai sektor yang terkait dengan ekonomi dunia dibahas dalam forum ini, seperti pendidikan, gender, lingkungan, makanan, energi, kesehatan, hingga produksi.

⁶ Indeks Daya Saing Pariwisata dan Perjalanan ini pertama kali dilaksanakan WEF pada Tahun 2007 yang selanjutnya dilaksanakan secara berkelanjutan setiap dua tahun sekali.

juga meningkat dari 4.0 pada Tahun 2015 menjadi 4.2 pada Tahun 2017 (naik 0.2). *World Economic Forum* dalam merumuskan laporan ini berdasarkan pada 14 indikator dan 89 sub-indikator. Salah satu indikator yang “secara konsisten” memperoleh rapor merah dari Kementerian Pariwisata adalah *Safety and Security* (Keamanan dan Keselamatan). Data teraktual memperlihatkan bahwa sektor ini menempati peringkat 91 dari 136 negara pada tahun 2017. Selanjutnya, indikator keamanan dan keselamatan memiliki lima sub-indikator yang diantaranya,

- 1) Kerugian akibat tindak kriminal dan kekerasan (*business costs of crime and violence*), pada peringkat 100/136 negara.
- 2) Reliabilitas pelayanan pihak kepolisian (*reliability of police services*), pada peringkat 70/136 negara.
- 3) Kerugian akibat aksi terorisme (*business costs of terrorism*) pada peringkat 113/136 negara.
- 4) Indeks insiden terorisme (*index of terrorism incidence*), pada peringkat 107/136 negara.

- 5) Tingkat pembunuhan (*homicide rate*), pada peringkat 6/136 negara.

Kelima indikator ini secara langsung terkait dengan isu keamanan nasional karena menyangkut jaminan atas keberadaan objek vital yang salah satunya kawasan pariwisata strategis hingga keselamatan warga negara maupun wisatawan. Tindak lanjut mengenai kondisi keamanan dan keselamatan pariwisata di Bali masih tetap terjaga, disamping realita eskalasi dan de-eskalasi konflik yang seakan membentuk suatu fenomena gunung es.⁷

Sebagaimana diketahui, perkembangan pariwisata Indonesia tidak lepas dari tumbuh kembang pariwisata Bali.⁸ Masyarakat Bali hingga saat ini tetap menjaga ketahanan budaya

⁷ Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik kepentingan pariwisata (persaingan pariwisata antar negara) masih berlangsung sehingga menimbulkan suatu keterancamannya bagi eksistensi pariwisata Bali khususnya, dan Pariwisata Indonesia pada umumnya. Maka dari itu ancaman terhadap keamanan dan keselamatan pariwisata Bali akan selalu ada dan hal ini akan membentuk suatu situasi *negative peace*. Maka dari itu, dibutuhkan suatu aksi nyata dalam menjaga keamanan dan keselamatan pariwisata Bali, setidaknya dari bahaya ancaman lima indikator yang telah ditentukan oleh *World Economic Forum*.

⁸Fatmawaty Malik, “Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali”, *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016, hlm. 68.

agar supaya kesejahteraan ekonomi dapat tetap bertahan atau bahkan meningkat. Indikator Keamanan dan Keselamatan Pariwisata dalam hal ini tentu terkait langsung dengan lingkungan strategis kepentingan negara yang kemudian mendasari konsep keamanan nasional. Keamanan nasional mempertanyakan tentang sesuatu yang perlu dipertahankan, sehingga hal itu berkenaan dengan dua pertanyaan *dasar what is that we seek to defend?* dan *why do we wish to defend it?*. Hal ini sehubungan tentang kebijakan "kepentingan nasional." Karenanya, sebelum merumuskan tentang kebijakan keamanan nasional, maka pertama-tama perlu dipahami isu ini berkenaan dengan kepentingan nasional.⁹ Dalam hal ini adalah sektor keamanan dan keselamatan Pariwisata Bali.

Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, diantaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta

interaksi antar masyarakat.¹⁰ Francis Fukuyama yang seorang Hegelian, membuktikan kebenarannya di tahun-tahun pertama abad 21. Pada masa sejarah yang baru (saat ini), negara tidak lagi berperang melawan negara lain, namun lebih kepada berperang terhadap fenomena sel-sel terorisme *amorf* (yang tidak berbentuk). Pada zaman ini, eksistensi perang berada pada ranah pertempuran yang baru – pusat kehidupan rekreasi warga sipil (Mansfeld & Pizam, 2006). Oleh karena itu dibutuhkan suatu kajian mengenai kondisi yang sebenarnya pada sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali dalam rangka pengujian secara internal terhadap penilaian oleh WEF terhadap pariwisata Indonesia. Selanjutnya, dalam kajian ini adalah sangat penting merumuskan suatu upaya peningkatan sektor keamanan dan keselamatan dalam rangka mewujudkan pariwisata damai di Bali.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif fenomenologis. Suatu metode yang biasanya menjadi sebuah solusi atas

⁹Riant Nugroho, *National Security Policy (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 22.

¹⁰Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2015), hlm. 27.

model penelitian yang bersifat positivistik yang dipandang tidak mampu menjelaskan hakikat suatu gejala manusia.¹¹ Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Spesifikasi lokasi penelitian akan ditentukan berdasarkan daftar narasumber yang disusun peneliti guna keperluan pengumpulan wawancara, maupun observasi lapangan. Kemudian, terdapat empat subjek utama penelitian yakni; (1) eksistensi terorisme yang berdasarkan sejarah Bom Bali I dan II hingga perkembangan dan pengaruh insiden terorisme saat ini; (2) Reliabilitas polisi pariwisata dalam sektor keamanan dan keselamatan pariwisata di Bali; (3) Pelaku tindak kekerasan & kriminal di sektor pariwisata Bali; dan (4) Pelaku industri pariwisata di Bali, dan (5) wisatawan. Pada tahap pembahasan kajian ini menggunakan analisis data secara induktif. Analisis ini digunakan karena beberapa alasan. *Pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang

¹¹ Permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana dituliskan pada bagian sebelumnya adalah hakikat pola kehidupan manusia dalam lingkungan rasa aman (keamanan) dan selamat (keselamatan) terutama di bidang pariwisata. Identitas manusia sebagai teroris, subjektivisme individu, hingga kebijakan pemerintah dibahas secara mendalam melalui metode ini. Lih. Bagong Suyanto & Sutinah (ed), *Metode Penelitian Sosial (Pelbagai Alternatif Pendekatan)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 209.

terdapat dalam data. *Kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. *Ketiga*, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. *Keempat*, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. *Kelima*, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.¹²

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahan masalah (Ezmir, 2010).¹³ Peneliti kemudian memilih teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang membagi kerangka analisis menjadi tiga bagian yakni reduksi data, model data (*data display*) dan verifikasi/ penarikan

¹² Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 330.

¹³ Prof. Dr. Ezmir, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85.

kesimpulan. Analisis filosofis juga digunakan dalam kajian ini karena pusat pemikiran terletak pada strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Analisis tersebut berupa, interpretasi, kesinambungan historis, dan heuristika.

Konsep Keamanan Pariwisata

Eksistensi keamanan pariwisata dalam hal ini berdasar pada dua pijakan, pertama adalah keamanan nasional (*national security*) dan kedua adalah keamanan manusia (*human security*). Keamanan Nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri.¹⁴ Sedangkan keamanan manusia lebih kepada perlindungan terhadap hak dasar manusia, keselamatan, hingga kesejahteraan. Oleh karena itu, pariwisata sebagai objek vital sekaligus individu-masyarakat yang terlibat didalamnya wajib mendapat

perlindungan atau memperoleh kondisi aman bebas dari segala ancaman.

Salah satu ancaman yang aktual hingga saat ini di sektor pariwisata adalah terorisme. Pandangan umum menyatakan bahwa fenomena terorisme lahir dari kebencian dan dendam. Namun pandangan tersebut masih dalam suatu sisi/ sudut pandang. Kebencian dan dendam adalah konsekuensi dari cinta yang gagal. Dalam arti ini terorisme adalah salah satu simbol dari cinta yang gagal.¹⁵ Deskripsi ini menunjukkan bahwa konflik yang ada dalam lingkup terorisme merupakan sebuah fenomena gunung es. Konflik yang melibatkan kelompok-kelompok besar non-negara muncul untuk mengancam secara langsung. Fenomena ini yang seharusnya dapat dikritisi bersama terutama pada salah satu sektor utama perekonomian yakni pariwisata.

Hal kedua yang seyogyanya dicermati adalah terkait eksistensi pengunjung (wisatawan). Keamanan dan keselamatan pengunjung bukan saja semata menjadi tanggung jawab pemilik (*owner*) atau pengelola destinasi wisata

¹⁴Yosua Praditya, *Keamanan di Indonesia*, (Depok: Nadi Pustaka, 2016), hlm. 13-14.

¹⁵ Reza A.A. Watimena, "Terorisme dan cinta yang gagal", dalam <https://rumahfilsafat.com/2010/10/13/terorisme-dan-cinta-yang-gagal/> diakses pada 2 Juli 2018 Pukul 21.00 WIB.

tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah maupun pusat (*stakeholder*) dalam memajukan pariwisata di tingkat daerah. Keamanan dan keselamatan pengunjung diprediksikan akan memberikan kontribusi pada peningkatan pengunjung selanjutnya akan menjadi faktor pendorong terciptanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat (*corporate social responsibility* atau CSR).¹⁶

Penurunan angka kunjungan wisatawan, berkurangnya permintaan wisatawan terhadap industri kerajinan, sepi kamar hotel dan restoran merupakan *multiplayer effect* dari aksi para teroris.¹⁷ Keamanan dan kenyamanan wisatawan adalah suatu keadaan yang diharapkan stabil, menimbulkan perasaan yang tenang tanpa disertai kekhawatiran dari orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat tujuan dan menginap selama beberapa waktu. Rasa aman dan nyaman mutlak diperlukan bagi para wisatawan untuk

mewujudkan rasa puas mereka dalam berwisata.¹⁸

Konsep Pariwisata Damai

Pariwisata ada karena keberadaan pergerakan manusia dalam pencarian terhadap sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kepentingan selalu melekat pada pariwisata baik kepentingan pribadi menyangkut gaya hidup, prestise, kesenangan (hiburan), kepuasan, kebebasan, dan kemerdekaan, juga kepentingan publik seperti kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya, bahkan kepentingan ideologi.¹⁹ Pada saat multi kepentingan tersebut berkontradiksi maka akan muncul konflik. Padahal kondisi dasar manusia dalam melakukan kegiatan wisata adalah dalam situasi bahagia. Manusia memosisikan kegiatan berwisata tersebut pada tujuan akhir setelah kebutuhan dasar lain terpenuhi. Hal ini menyebabkan situasi damai, aman, dan nyaman menjadi pertimbangan awal untuk menentukan keputusan individu dalam berwisata. Kerangka tersebut membuat pariwisata damai eksis sebagai suatu konsep dan nilai dalam ruang lingkup pariwisata itu

¹⁶ Suharto, "Studi tentang Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)", *Jurnal Media Wisata*, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 288.

¹⁷ I Gusti Agung Oka Mahagangga, dkk, "Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan di Bali (Kajian Awal Kriminalitas Pariwisata)", *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm. 97-105.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sarbini, *Filsafat Pariwisata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 10.

sendiri. Louis D'Amore pada 1986 mendirikan *International Institute through Peace to Tourism* melalui landasan filsafati tentang dasar pemikiran dari pariwisata itu sendiri. Louis D'Amore mendeskripsikan pariwisata damai yang merupakan suatu konsep pembangunan pariwisata yang mempercepat rasa saling pengertian dalam masyarakat. Suatu pengembangan pariwisata yang memperhatikan kekuatannya sehingga dapat membantu umat manusia menuju kehidupan yang damai dan harmonis.²⁰

Pariwisata damai (*peace tourism*) adalah konsep baru dalam khasanah keilmuan pariwisata. Pariwisata damai dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan, ketenangan dan tanpa peperangan yang dibangun dari kedamaian dalam diri, alam lingkungan dan Tuhan dalam perilaku bentuk pariwisata.²¹ Konsep pariwisata ini muncul akibat pelbagai dampak dari konflik, aksi teror, dan tingkat kriminal yang tinggi. Implikasinya tentu mengurangi jumlah kunjungan

wisatawan yang peduli akan keselamatan dan risiko. Pada saat itu juga akan muncul pelbagai peringatan pemerintah dalam bentuk kewaspadaan hingga larangan untuk berwisata ke negara yang dianggap sedang tidak aman.²² Pariwisata damai kemudian menjadi sebuah kewajiban etis bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang oleh *United Nation World Tourism Organizations* (UNWTO) dianggap dapat mengatasi masalah kemiskinan hingga problematika keamanan.²³ Pemikiran mengenai sifat damai pada pariwisata merupakan suatu konsep yang menjanjikan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Konsep ini dapat mereduksi pelbagai sifat keterancaman individu sehingga dapat menghindarkannya dari perilaku destruktif. Konsep pariwisata damai dapat membentuk pola pikir individu yang lebih peduli terhadap situasi di sekitarnya yang belum tentu sebahagia sebagaimana yang dirasakan saat berwisata. Nilai-nilai perdamaian yang

²⁰ United Nation World Tourism Organization (UNWTO). *International Handbook on Tourism and Peace*. (2013, Austria: Drava Verlag.), hlm. 27.

²¹ Nyoman Ariana, *Penelusuran Wisata Damai Monumen Ground Zero Kuta Bali*, (2017, Denpasar: Pustaka Larasan), hlm. 1.

²² Lih. Susanne Becken & Fabrizio Carmignani, "Does Tourism Lead to Peace?", *Journal Annals of Tourism Research*, 61, Australia (2016), hlm. 63–79

²³ Lih. Stuart E. Levy & Donald E. Hawkins, "Peace Through Tourism: Commerce Based Principles and Practices", *Journal of Business Ethics*, Vol. 89, Supplement 4: PEACE THROUGH COMMERCE: A MULTISECTORAL APPROACH (2009), pp. 569–585.

universal pada akhirnya dapat membangkitkan rasa peduli individu atas kondisi sosio-ekonomi individu lain hingga pada kondisi yang penuh dengan kekerasan di suatu negara.

Kondisi Sektor Keamanan dan Keselamatan Pariwisata Bali

Hasil temuan di lapangan telah memperlihatkan bahwa kondisi sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali butuh perhatian yang lebih serius.²⁴ Sebagaimana WEF dalam TCI 2017 telah memberikan penilaian terhadap pariwisata Indonesia yang mana sektor *safety and security* mendapatkan skor yang buruk. Berdasarkan empat sub-sektor yang mendapatkan nilai yang tidak cukup baik, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa kerugian akibat tindak kriminal baik yang berasal dari penyedia wisata ataupun wisatawan berdampak buruk bagi eksistensi pariwisata Bali. Disamping itu, kualitas pelayanan kepolisian meskipun secara keseluruhan mendapat penilaian baik dari masyarakat, namun

masih ditemukan penegakan hukum yang tebang pilih di sektor pariwisata.

Kerugian akibat insiden teror yang meskipun terjadi di luar pulau Bali juga memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan dikarenakan beberapa negara mengeluarkan peringatan resmi kunjungan. Dalam kondisi ini, sektor keamanan masih memperlihatkan situasi *negative peace*. Pada upaya pencegahan tindak kekerasan, kriminal, hingga ancaman terorisme, di Bali hingga saat ini terdapat pecalang dan eksistensi desa adat dalam menjaga kerukunan dan keamanan wilayah dan masyarakat. Peraturan Daerah mengenai pecalang saat ini memang sudah ada, namun kebijakan tersebut tidak secara terperinci menyebutkan fungsi pecalang dalam upaya pengamanan sektor pariwisata. Dinamika ancaman yang telah mengarah pada *tourism war* yang bersifat asimetris sudah seharusnya mendapatkan respon dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pecalang dan desa adat.

Kesadaran manusia atas keamanan sering baru mendapat perhatian pada saat *post-incident* atau setelah ancaman terealisasi menjadi suatu tindakan

²⁴ Realita ini oleh para narasumber secara pragmatis dikhawatirkan akan berdampak buruk pada masa depan pariwisata Bali.

kekerasan.²⁵ Keamanan pada kondisi ini muncul sebagai sebuah eksistensi penanggulangan bukan sebagai langkah pencegahan. Peristiwa bom Bali dapat menjadi contoh fenomena ini, kejadian tersebut yang kemudian melahirkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁶ Peristiwa ini secara positif dianggap sebagai momentum keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme. Namun di sisi lain hal itu dipandang sebagai sebuah keterlambatan atau kegagalan

²⁵ Pasca perang dunia kedua manusia baru memikirkan atas keamanan individu yang juga penting dalam mewujudkan keamanan nasional. Transformasi dari keamanan tradisional menjadi konsep keamanan modern yang melindungi seluruh sumber daya yang terpusat pada keamanan manusia. Namun, terulangnya perang dunia kedua membuat analisis mengenai kekerasan di segala sektor semakin kritis untuk menjaga kondisi damai di semua sisi kehidupan.

²⁶ Kesenambungan historis antara kasus penyerangan Gedung World Trade Center (WTC) di Amerika dengan peristiwa bom Bali ini benar-benar menjadi dasar pemikiran tentang *tourism security*. "One of the main reasons for this has to do with the threat of global terrorism following the September 11 2001 terrorist attacks on the USA, and other violent attacks against tourists in places such as Egypt and Bali. In the Caribbean, dramatic increases in violent crime during the last two decades and the extensive media coverage of crimes against tourists in traditionally low crime destinations such as Aruba, Antigua and Tobago have made tourism security an important developmental issue for the regional policy makers." Lih. Ian Boxill, "Linking tourism security to national security: A brief comment on the implications of the Christopher Coke Saga", *Worldwide Hospitality and Tourism* Vol. 4 No. 1, 2012pp. 26-31 Emerald Group Publishing Limited 1755-4217 DOI 10.1108/17554211211198561.

pengecahan. Terlepas daripada itu, negara punya kuasa penuh terhadap keamanan. Filsuf Jean-Jacques Rousseau pernah mengemukakan bahwa "*The nation is in the relations of the state to its members: when its relations change or cease to exist, the nation vanishes.*" Keamanan Pariwisata dalam hal ini tentu menyangkut relasi anggota negara (masyarakat) kepada negara/bangsa sebagaimana keamanan nasional dipahami.²⁷

Perihal ini terkait dalam konteks keamanan dimana suatu negara dituntut untuk mulai memikirkan upaya perlindungan keamanan masyarakat dunia dari ancaman kemiskinan, krisis pangan, penyakit endemik, kerusakan lingkungan hidup, kekerasan, konflik, dan terorisme.²⁸ Perdamaian, keselamatan, dan keamanan merupakan salah satu kondisi yang utama dalam kesuksesan pembangunan pariwisata.²⁹

²⁷ Lih. Paul Kowert and Jeffrey Legro, "Norms, Identity and Their Limits: A Theoretical Reprise" dalam Peter J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, (New York: Columbia University Press, 1996), hlm. 365.

²⁸ Kazan Gunawan, *Konstruksi Media terhadap Diskursus Keamanan Nasional*, (Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm.53-54.

²⁹ Yoel Mansfeld & Abraham Pizam (editor), *Tourism Security & Safety*, (USA: Elsevier Butterworth, 2006), hlm. 16.

Realita pariwisata Indonesia sebagai sektor penyumbang devisa terbesar kedua nasional yang 40% dari total pemasukan tersebut berasal dari pariwisata Bali. Kondisi ini sudah seharusnya memiliki rumusan khusus mengenai keamanan pariwisata agar masa damai (*peacetime*) bisa terus eksis dan masyarakat bisa sejahtera. Metode ini secara mutlak memiliki nilai dasar preventif bukan lagi sebagai penanggulangan pasca insiden sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.

Fenomena terorisme di Bali (Bom Bali 1 dan 2) mengindikasikan bahwa ancaman yang terealisasi menjadi serangan bom memiliki tujuan terhadap sebuah pengakuan suatu paham tertentu. Sikap dan perilaku ini juga mengandung unsur kebenaran subjektif dengan memberikan “nilai benar” terhadap aksi kekerasan tersebut.³⁰ Peter E. Tarlow selanjutnya menjelaskan bahwa *the tourism industry is the world's*

*largest peacetime industry.*³¹ Negara-negara di dunia telah mengakui bahwa pariwisata dianggap menjadi salah satu ajang meraih pendapatan mata uang asing termudah bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, sangat logis bagi oknum yang memiliki keinginan untuk menghancurkan ekonomi suatu negara, salah satu targetnya tidak lain adalah industri pariwisata negara yang bersangkutan. István Kôvári & Krisztina Zimányi menjelaskan bahwa terdapat tiga konsekuensi dalam permasalahan keamanan dan keselamatan pariwisata, yakni:

- 1) Konsekuensi ketidaktergantungan masalah keamanan di dunia global.
- 2) Masalah terkait keamanan yang berasal dari internet
- 3) Keamanan dalam *travel and tourism* versus kebebasan dan hak asasi manusia.³²

Tiga konsekuensi di atas sangat tepat dalam menggambarkan realita permasalahan keamanan dan

³⁰ Fenomena ini oleh beberapa ahli disebut sebagai puncak intoleransi yang berdasarkan kebencian dan dendam. Para aktor menganggap sejarah kekerasan yang diterima oleh masyarakat lain yang merupakan bagian dari komunitasnya ditransformasi sebagai ajang balas dendam juga dengan kekerasan.

³¹ Yoel Mansfeld & Abraham Pizam, *op.cit.*, hlm. 41.

³² István Kôvári & Krisztina Zimányi, *Safety and Security Age of Global Tourism (The changing role and conception of Safety and Security in Tourism)*, (Budapest: Agroinform Publishing House, 2011), hlm. 61.

keselamatan pariwisata Bali. Kepentingan nasional masing-masing negara yang berbeda, membuat posisi Indonesia dan Bali pada khususnya harus membentuk sistem keamanan pariwisatanya sendiri tanpa tergantung kepada pihak manapun.

Keberadaan sebuah ancaman sebagai tanda awal tindakan kekerasan dan aksi kriminal di sektor pariwisata, tentu membutuhkan perhatian yang serius. Kekerasan menjadi salah satu faktor selain epidemi (wabah penyakit), kecelakaan lalu-lintas, hingga pada perawatan kebersihan dan kondisi lingkungan sangat sering ditemukan pada sektor pariwisata negara-negara berkembang.³³ Kondisi pariwisata Bali yang tidak akan pernah bebas dari ancaman maupun pengaruh ancaman secara otomatis menjurus pada eksistensi keamanan dan keselamatan oleh manusia Bali itu sendiri. Sesuatu yang memiliki prioritas lebih luas dari keamanan pariwisata yakni “keselamatan” memberi corak tersendiri terhadap subjek (masyarakat Bali dan wisatawan) termasuk pada usaha

menjaga tempat wisata, lingkungan, dan alam Bali (objek fisik pariwisata).

Pemahaman mengenai konsep keamanan manusia sebagai paradigma yang muncul untuk memahami kerentanan tatanan global terhadap konsep tradisional keamanan nasional melalui argumen bahwa rujukan yang tepat untuk keamanan adalah individu.³⁴ Manusia menjadi perhatian utama dalam menciptakan nuansa aman dan nyaman terhadap manusia lain. Hal ini juga berlaku dalam pariwisata, masyarakat Bali sebagai pengelola dan wisatawan sebagai pengunjung mendapatkan suatu timbal balik atas jaminan keamanan dan keselamatan selama proses berwisata itu berlangsung.

Konsep Keamanan manusia adalah kunci dalam peningkatan sektor keamanan dan keselamatan pariwisata di Bali. Amartya Sen mengungkapkan bahwa keamanan manusia dipahami sebagai perlindungan dan pelestarian “keberlangsungan hidup” dan “kehidupan sehari-hari”

³³Ninela Kordić, dkk, *Safety and Security as Factors of Tourism Destination Competitiveness*, (Serbia: Singidunum University, Belgrade, 2015), hlm. 36.

³⁴ Ilya Sokov, “Human Security as a Universal Value”, *Journal of Human Security*, Vol. 8 Issue 1, 2018, hlm. 68.

manusia.³⁵ *Human security* juga merupakan konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara sehingga setiap individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka. Keberlangsungan hidup wisatawan, penyedia pariwisata, penegak hukum, hingga masyarakat Bali mendapatkan jaminan dari konsep keamanan manusia (*human security*) tersebut. Setiap individu kemudian dapat saling menjaga satu sama lain melalui pelbagai aktivitas, yang pada akhirnya menjurus pada kerangka keamanan yang lebih luas yakni keamanan nasional hingga keamanan global.

Upaya Peningkatan Sektor Keamanan dan Keselamatan Pariwisata Bali

Geoffrey Wall menyebut bahwa keberlangsungan industri pariwisata berada dalam lingkungan yang sangat dinamis bahkan bergejolak. Situasi ini ditandai oleh pelbagai peristiwa global dan lokal hingga pada akhirnya memiliki konsekuensi besar bagi keberhasilan ekonomi. Pengaruh tersebut dapat

³⁵ Mary Martin and Taylor Owen (editor), *Routledge Handbook of Human Security*, (New York: Routledge, 2014), hlm. 17.

berupa perang, krisis politik, kegiatan terorisme, bencana alam, keadaan darurat kesehatan, atau peristiwa ekstrim lainnya. Pengaruh tersebut secara total memiliki dampak yang cepat dan biasanya negatif bagi masyarakat yang terlibat dalam pariwisata.³⁶ Hal serupa juga berlaku di Bali, aksi terorisme di Jawa Timur, tsunami di Palu, krisis politik pada Pilgub DKI, dan peristiwa nasional lain di Indonesia secara tidak langsung memengaruhi perkembangan pariwisata Bali. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya komprehensif untuk melakukan peningkatan di sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali dalam mewujudkan perdamaian.

Pada tahap periode kompromi saat ini³⁷, ancaman terhadap pariwisata

³⁶ Yoel Mansfeld & Abraham Pizam (editor), *Op.Cit.*, hlm. 143.

³⁷ Sejarah ketahanan pariwisata Bali hingga saat ini terbentuk atas dasar pola kebudayaan dan peradaban manusia (masyarakat Bali) dalam merespon sektor kepariwisataan tersebut. Sejarah Pariwisata Bali diketahui terbagi menjadi tiga yakni dimulai dari tahap pengenalan (1902-1913), tahap reaksi (1914-1938), dan tahap pelembagaan (1950-2017). Tahap Pelembagaan ini kemudian dibedakan menjadi empat tahapan, yaitu Pelembagaan I (1950-1968), tahapan Pelembagaan II (1969-1990), dan tahapan Pelembagaan III (1991-2011), dan diperoleh tahap terakhir yang disebut sebagai tahap kompromi (2012-sekarang) sebagai suatu tahap perkembangan pariwisata yang sedang berjalan ke depan (Anom, dkk 2017).

Bali semakin kompleks karena diketahui telah terjadi persaingan secara asimetris. Kearifan lokal Bali dalam konteks pengamanan merujuk pada eksistensi “pecalang” dalam memberikan perlindungan pada hampir setiap kegiatan desa adat. Pecalang merupakan perangkat keamanan desa adat di Bali yang pada awalnya hanya bertugas sebagai “Polisi Upacara” pada saat dilaksanakan upacara agama di desa adat. Masyarakat Bali sangat menghormati dan mentaati pecalang dalam pelaksanaan tugasnya, karena pecalang bertugas menegakkan awig-awig (hukum adat).

Dinamika pariwisata yang saat ini telah memberikan pengaruh di seluruh wilayah Bali secara tidak langsung berhadapan dengan eksistensi desa adat. Fungsi pecalang sebagai petugas pengamanan desa adat dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjaga keamanan pariwisata wilayah desa adat yang bersangkutan dari potensi kejahatan. Aksi kejahatan di sektor pariwisata Bali mayoritas bermotif kepentingan ekonomi, sehingga kerugian materiil juga dirasakan oleh korban. Pada kesempatan ini pecalang dapat menambah fungsinya dalam menjaga

wilayahnya dari oknum-oknum jahat. Perlindungan ini tidak hanya berdampak kepada desa adat, namun juga dapat melindungi wisatawan dan kawasan pariwisata itu sendiri. Pihak pecalang dalam hal ini dapat menjadi sistem keamanan primer dalam membantu pihak kepolisian selaku penegak hukum yang telah melaksanakan kewajibannya, baik secara *hard power* maupun *soft power*.

Masyarakat Bali selaku tuan rumah dapat mendalami etika pariwisata dalam menghadapi segala jenis ancaman kekerasan dan tindak kriminal di bidang pariwisata. Sikap kesiapsiagaan (*alertness*) dan sikap peduli (*care*) merupakan nilai aplikasi dari perwujudan kearifan lokal Bali yakni Tri Hita Karana yang dapat dicapai melalui pendidikan karakter. Profesor Budiarsa sebagai akademisi di bidang pariwisata dalam keterangannya sangat yakin terhadap dua nilai kunci yakni *alterness* dan *care* sebagai solusi bagi permasalahan mengenai keamanan dan keselamatan di bidang pariwisata.

“Ya, ada care dan alertness kita harus punya rasa kesiapsiagaan, peduli pada lingkungan, dan peduli kepada diri kita sendiri, peduli dengan sesama. Kalau sudah itu,

pasti kita bisa wujudkan (TS&S). Jadi nanti ada slogan yang sederhana, because we care, we can.”³⁸

Masyarakat selaku *stakeholder* dalam pengamanan internal dapat memanfaatkan dan meningkatkan fungsi pekalang sebagai langkah preventif dalam membantu pihak kepolisian. Analisis peneliti, terhadap eksistensi pekalang di Bali sebagai tokoh yang paling dekat dengan wisatawan yang tinggal di wilayah desa adat dapat melakukan pelbagai langkah dalam menunjang keamanan masyarakat dan lingkungan desa adat. Pekalang dapat melaksanakan deteksi dini dan cegah dini *early warning system* terkait kegiatan wisatawan yang mencurigakan bahkan sekaligus menghadirkan jaminan terhadap wisatawan terkait keamanan dan keselamatannya. Pekalang juga berfungsi sebagai badan pengumpul keterangan (*bapulket*)³⁹ sebagaimana

³⁸ Kutipan wawancara bersama Prof. Dr. I Made Budiarsa, M.A., sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sekaligus Kaprodi Program S3 Pariwisata Universitas Udayana, 24 Oktober 2019 bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

³⁹ Badan Pengumpul Keterangan ini menjadikan pekalang sebagai intelijen desa adat yang bertanggung jawab penuh tidak hanya pada penanggulangan namun lebih kepada pencegahan tindak kekerasan dan kriminal di sektor pariwisata wilayah desa adatnya masing-masing.

teori CEWERS (*Conflict Early Warning & Early Response System*) yang menjelaskan bahwa deteksi dini merupakan salah satu cara paling efektif dalam mencegah konflik yang dalam hal ini adalah tindak kekerasan atau kriminal. Kondisi dasar wisatawan yang bahagia tidak selalu memosisikan dirinya berperilaku positif.⁴⁰ Wisatawan selain melakukan kegiatan berlibur juga tidak jarang melihat potensi Bali yang luar biasa sebagai lahan investasi bisnis baik yang positif seperti properti, restoran, hingga pertokoan juga ada yang negatif seperti narkoba, dan bisnis ilegal lainnya. Jadi fungsi pekalang yang pada awalnya hanya mengamankan kegiatan upacara agama dan sebagai penegak hukum desa adat (*awig-awig*) juga perlu untuk menjalin sinergitas kepada penegak hukum negara yakni pihak kepolisian.

Keberadaan dan tugas pekalang sebagai perangkat desa adat secara tegas telah diatur pada pasal 17 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 sebagai berikut:

⁴⁰ CEWERS merupakan suatu sistem peringatan dan tanggap dini konflik berupa serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pencegahan konflik. Lih. Program Peace through Development & Institut Titian Perdamaian, *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, (Jakarta: BAPPENAS, 2012).

- a. Keamanan dan ketertiban wilayah desa Pakraman dilaksanakan oleh Pecalang
- b. Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama.
- c. Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman berdasarkan paruman desa.

Tugas pecalang berkaitan erat dengan pengamanan pelaksanaan Tri Hita Karana di wilayah desa adat, secara garis besar meliputi pengamanan terhadap proses pelaksanaan ritual keagamaan (*parahyangan*), menjaga keselamatan warga desa (*pawongan*), dan menjaga keamanan rumah dan pekarangan warga desa serta tanah *ayah* desa adat (*palemahan*).⁴¹

“Foreigners Community Club (FCC)”

Citra kepolisian yang tegas dan keras tergambarkan secara umum di lingkungan pariwisata hampir di seluruh dunia. Lebih dari itu, wisatawan

cenderung sangat menghindari untuk berurusan dengan kepolisian setempat. *Stereotype* ini kemudian membuat hubungan antar wisatawan dengan kepolisian cukup renggang. Kepolisian Daerah Bali melalui Subdit Wisata dalam hal ini telah memiliki suatu program yang dinamakan *Foreigners Community Clubs* (FCC) yang merupakan suatu komunitas wisatawan yang memiliki *basecamp* di Kantor Polisi Pariwisata Kuta. Komisaris Polisi Fahmi Attamimi, M.Par. adalah penggagas program ini. Beliau berusaha membuat citra polisi lebih ramah terhadap seluruh sumber daya manusia yang terlibat langsung di sektor pariwisata. Sesuatu yang berbeda telah dibuat dan lebih dari sekadar eksistensi polisi pariwisata biasanya dengan menyediakan wadah berupa lokasi tempat wisatawan berkumpul, mengadakan sesuatu, hingga berdiskusi tentang keamanan pariwisata Bali.

Kehadiran FCC diharapkan bisa memperoleh kepercayaan dari wisatawan mancanegara khususnya terhadap Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini Polisi Pariwisata. Langkah ini merupakan perwujudan dari empat elemen keamanan manusia oleh *United*

⁴¹Gede Indra Pramana, “Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan di Bali”, *Jurnal Lakon Vol. 1 No. 1 Mei 2012*, Magister Kajian Sastra dan Budaya, Universitas Airlangga, hlm. 14.

Nations Development Programme (UNDP)⁴² yakni:

1. Universalitas, bahwa *human security* bersifat universal, bersama atau relevan untuk semua orang di manapun. FCC sebagai sebuah komunitas telah berkomitmen memberlakukan persamaan hukum sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia kepada seluruh wisatawan tanpa membedakan. FCC juga menjadi wadah sosialisasi terhadap wisatawan tentang hukum di Indonesia, hukum adat Bali, hingga sosialisasi anti narkoba.

2. *Human security* memiliki karakter interdependen dalam arti bahwa tidak mungkin membatasi sebuah ancaman dalam batas-batas spasial atau temporal tertentu. Kondisi pariwisata yang dinamis di Bali, membuat keberadaan ancaman saat ini sangat kompleks. Oleh karena itu FCC dijadikan sebagai wadah pertukaran informasi antar wisatawan, kepolisian dan masyarakat Bali.

3. Ancaman terhadap *human security* lebih optimal dilakukan dengan pencegahan daripada intervensi atau penanganan. Polisi sebagai *stakeholder* utama Keamanan Ketertiban Masyarakat

(Kamtibmas) telah merepresentasikan kehadiran FCC sebagai upaya preventif disamping program-program yang dilaksanakan secara rutin lainnya.

4. *Human security* berorientasi pada manusia (*people-centered*), yakni bagaimana orang hidup dalam masyarakat, seberapa bebas suatu individu-komunitas dapat menentukan pilihan maupun punya akses terhadap pelbagai peluang yang ada. Polisi Pariwisata dalam pembentukan FCC ini juga berusaha memberikan keterjaminan atas keamanan dan keselamatan pariwisata melalui edukasi hak dan kewajiban wisatawan. Sosialisasi ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Pasal 26 Ayat 4 Poin (c) yang menyebutkan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan keamanan dan kenyamanan, termasuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan usia lanjut dan penyandang cacat. Wisatawan disamping itu juga dapat turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan tidak

⁴² UNDP, *Human Development Report*, (New York: Oxford University Press, 1994), hlm. 22.

melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.⁴³

FCC terdiri dari beberapa ruangan yakni ruang diskusi, ruang gym (fitness), perpustakaan, ruang kantor, dan *café*. Kopol Fahmi selaku penggagas sangat berharap citra polisi pariwisata bisa dikenal lebih ramah dan bersahabat namun tetap tegas oleh wisatawan mancanegara. Tujuan utama FCC agar supaya citra polisi tidak lagi menakutkan dan cenderung dihindari oleh wisatawan. Kopol Fahmi berkeyakinan bahwa tatkala wisatawan sudah merasa nyaman maka keterbukaan informasi lebih mudah diperoleh hingga wisatawan merasa terlindungi (merasa aman) dari pelbagai ancaman.

Mewujudkan Pariwisata Damai di Bali

Fenomena alienasi manusia dalam psikologi klinis digunakan untuk menunjukkan keadaan yang menyebabkan konflik. Permasalahan ini dapat berupa kehilangan identitas diri, dipersonalisasi, yang disebabkan oleh tekanan lingkungan, dan karena tuntutan sosial yang berlebihan.⁴⁴ Fromm menjelaskan bahwa penyebab sifat

destruktif pada awal mula masyarakat modern adalah alienasi dari diri sendiri dan kebebasan manusia. Jadi manusia membuat dirinya sendiri tunduk pada sistem saat itu (kapitalis) dan otoritarian. Kajian tentang manusia dalam pandangan Fromm tidak bisa bertitik tolak hanya pada kerangka konstruksi metafisik⁴⁵, karena perkembangan manusia itu dinamis dan dialektik. Maka kemudian, untuk memahami manusia, harus diperhatikan kondisi sosio-ekonominya yang lebih mendalam.⁴⁶

Transformasi pariwisata Bali yang sudah memasuki periode lebih dari 100 tahun telah memberikan dampak perubahan identitas manusia Bali dalam memandang pariwisata. Sejak awal, pariwisata budaya telah menjadi identitas Bali yang kemudian memang terjadi perubahan tahapan paradigma berpikir manusianya sekaligus penyesuaian terhadap permintaan. Pada tahapan pengenalan (1902-1913) manusia

⁴⁵ Pemahaman ini memosisikan manusia dalam pemahaman sebagaimana dunia fisik adalah cerminan dari metafisik, atau esensi dari manusia itu. Argumen Fromm dalam hal ini mengindikasikan kajiannya berfokus pada dimensi aksiologis terutama etika psikoanalisis yang humanis.

⁴⁶ Manusia dari sudut pandang filsafat dapat dilihat dari dua sisi, yakni eksternal yang melihat manusia dari sisi tubuh yang sifatnya materi dan internal yang melihat manusia dari sisi jiwa, rohani dan kesadaran.

⁴³ Pasal 27 Ayat 2 Poin (c & d) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali.

⁴⁴ Shadily Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtihar Baru, 1991), hlm. 14.

Bali masih bersih dari orientasi ekonomi, kehidupan sosial budaya berjalan secara sangat alami, sebagaimana ajaran adat dan agama Hindu. Fromm menjelaskan pada fase *pre-human*, manusia hanya menjadi bagian dari alam, dan menyatu dengan hukum alam tanpa ada kemauan serta kemampuan untuk melakukan transendensi. Perilaku manusia sebatas untuk mengadaptasikan dirinya dengan hukum-hukum alam. Cara keberadaan manusia, tindakan atau perilakunya secara keseluruhan diarahkan oleh naluri dan oleh pola-pola tindakan spesifik atau menurut bahasa Fromm “*his action were guided by instinct, by specific action pattern determined by inherited neurological structure*”. Kualitas yang kemudian berkembang dari fase *pre-human* adalah tentang kesadaran diri, akal, dan imajinasi seiring memudarnya kesadaran instingtif (hewan).⁴⁷ Pemikiran kritis terkait pariwisata Bali telah muncul pada tahapan reaksi (1914-1938) yang berusaha merumuskan nilai

⁴⁷ Bagi hewan, lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah. Fromm menjelaskan bahwa manusia dapat membentuk lingkungan atas dasar kesadaran diri yang tidak dimiliki oleh hewan. Lih. Erich Fromm, *Masyarakat yang Sehat*, terj “The Sane Society”, Thomas Bambang Murtianto, (Jakarta: Yayasan Obor: 1955), hlm. 22.

dasar atau karakter dari pariwisata Bali.⁴⁸ Hingga pada perkembangan saat ini, pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tetap berbasis budaya memang sesuatu yang benar-benar harus diperjuangkan manusia Bali untuk mewujudkan perdamaian.

Ketakutan adalah dampak paling umum yang dirasakan wisatawan baik yang sedang merencanakan atau bahkan yang sudah berwisata di Bali. Setiap individu (manusia) di Bali dalam hal ini harus tetap humanis dalam merespon ancaman-ancaman terorisme. Sejarah Bali yang dua kali dijatuhi bom justru semakin mengingatkan manusia Bali terhadap nilai-nilai kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana* hingga *Tat Twam Asi*. Pada saat pelaku bom Bali 1 tertangkap dan kemudian diketahui identitasnya adalah seorang WNI ditambah suku Jawa dan beragama Islam, yang notabene adalah tetangga pulau Bali. Sebagaimana konflik SARA yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit yang saling

⁴⁸ Terjadi kecaman cendekiawan Bali dalam majalah *Surya Kanta* Tahun 2025 yang mengkritik Bali sebagai “museum hidup”, Lih. I Putu Anom, dkk, “Turismemorfosis: Tahapan Selama Seratus Tahun Perkembangan dan Prediksi Pariwisata Bali”, *Metamorfosis Pariwisata Bali* (Tantangan Membangun Pariwisata Berkelanjutan), (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hlm. 6.

serang melakukan balas dendam dengan hasil ratusan korban jiwa, namun oleh masyarakat Bali “tidak satupun batu kerikil kecil dilemparkan ke pulau sebelah (P. Jawa)”. Masyarakat Bali lebih memilih untuk melakukan introspeksi ke dalam dengan meneguhkan kembali keyakinan *Tat Twam Asi* yang bermakna aku adalah kamu, kamu adalah aku, maka melakukan balas dendam adalah sama dengan membunuh diri sendiri. Pasca bom Bali 1 masyarakat Bali memutuskan untuk melakukan upacara penyucian dengan tujuan agar kembali hening dan damai dan sama sekali tidak ditemukan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, penyerangan tempat ibadah agama tertentu di Bali.⁴⁹

Salah satu cara untuk meniadakan rasa keterancaman manusia adalah membentuk sikap manusia yang terbebas dari alienasi.⁵⁰ Dalam masyarakat modern, fenomena alienasi hampir bersifat total. Hal ini meliputi hubungan ekonomi (dalam proses produksi dan konsumsi) hubungan

manusia dengan sesama, dan hubungan manusia pada dirinya sendiri.⁵¹ Manusia tentu memiliki kehendak dasar agar dirinya terbebas dari ancaman padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Individu (manusia) Pariwisata di Bali saat ini sedang mengalami alienasi dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Produksi berjalan sesuai kehendak wisatawan dan permintaan pasar yang mayoritas menjadikan manusia Bali tidak sebagai dirinya sendiri. Pariwisata memiliki produk sebagaimana membuat keputusan pada tingkat pribadi, misalkan wisatawan yang bagaimana dan ke mana harus pergi, atau keputusan kelompok, misalnya kelompok *stakeholder* termasuk dalam kebijakan dan perencanaan pariwisata, dan sejauh mana tingkat keterlibatan. Keputusan ini seringkali menyangkut persoalan ekonomi, sosial, politik dan ekologis, menjadi sulit dalam begitu banyak tuntutan. Sebagai pembuat keputusan untuk menghormati komitmen bahwa harus menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan cara yang etis.⁵²

⁴⁹ Lih. Gede Prama, “Shanti Shanti Shanti” dalam, <https://www.belkedamaian.org/ebooks/2016/12/28/e-book-shanti-shanti-shanti-menemukan-tuhan-di-dalam-diri.html> diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 22:09 WIB.

⁵⁰ Alienasi dalam pandangan Fromm merupakan suatu bentuk pengalaman ketika orang mengalami dirinya sebagai orang asing.

⁵¹ Nana Sutikna, *Keterasingan Manusia (Alienasi) menurut Erich Fromm*, (Tesis, Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. ix.

⁵² Sarbini, *Filsafat Pariwisata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 249

Satu abad lebih pariwisata Bali telah tumbuh berkembang hingga saat ini oleh warga dunia masih menjadi daya tarik tersendiri. Tahap kompromi telah bertransformasi menjadi suatu masa dimana tuntutan untuk menjaga suatu citra destinasi harus tetap digalakkan. Peningkatan sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali justru dapat mengembalikan pelbagai unsur ketahanan budaya yang berbasis pada kearifan lokal dan agama hingga membentuk suatu situasi damai. Kondisi ini kemudian yang harus diwujudkan untuk memberikan suatu jaminan kebasan dari pelbagai ancaman yang ada (*positive peace*).

Konsep Wisata Damai adalah salah satu sifat dasar dari pariwisata Bali itu sendiri. Filosofis masyarakat Bali dipegang teguh sebagai nilai dasar dalam dinamika pembangunan masyarakat. Dalam kaitan ini pariwisata juga sebagai bagian integral dari kebudayaan Bali perlu secara utuh mengaplikasikan filosofis (nilai budaya) dalam pariwisata. Pada saat nilai filosofis Bali mampu dinternalisasi dalam keseharian masyarakat, maka tujuan mengembangkan pariwisata yang selamat, yaitu pariwisata damai niscaya

akan terwujud.⁵³ Pariwisata Damai dapat memberikan suatu pemikiran baru yang diaplikasikan melalui kegiatan wisata. Hal tersebut terwujud dalam perilaku suatu individu ke "orang lain" memberi pengertian bahwa dunia ini punya banyak hal untuk ditawarkan daripada hanya mengikuti satu model kehidupan. Selanjutnya, pada garis batas antar negara / wilayah pariwisata damai akan memberi dampak pada suatu hubungan harmonis yang pada akhirnya muncul simbiosis mutualisme antar daerah ataupun negara untuk pariwisata. Terakhir yakni tentang historisitas perang yang menciptakan perdamaian dan pariwisata yang saling terkait dan berhubungan secara resiprokal.

Kesimpulan

Kondisi sektor ini telah bertransformasi dari pola perilaku kekerasan menuju pada level yang lebih ramah namun penuh kepentingan. Tragedi teror di luar wilayah Bali secara otomatis memengaruhi pariwisata tidak lain karena Indonesia masih menjadi induk negara dan Bali sebagai provinsi. Standar sistem keamanan hotel, relasi hubungan antara masyarakat dan

⁵³Nyoman Ariana, *Penelusuran Wisata Damai Monumen Ground Zero Kuta Bali*, (2017, Denpasar: Pustaka Larasan), hlm. 18.

wisatawan, hingga degradasi budaya juga memengaruhi sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali. Manusia atau individu yang terlibat dalam sektor pariwisata harus memiliki tingkat kesiapsiagaan (*alertness*) dan peduli (*care*) terhadap sesama sebagaimana Tri Hita Karana eksis di Bali. Pihak kepolisian yang dalam sektor ini perlu melakukan pelbagai peningkatan mulai dari sisi penerapan teknologi hingga kemampuan bahasa asing. Peneliti menyimpulkan bahwa individu yang terlibat langsung baik penyedia maupun pelanggan pada sektor pariwisata masih merasakan aspek keterancaman di sektor ini.

Selanjutnya peneliti berkesimpulan bahwa Pariwisata Bali dapat melaksanakan beberapa peningkatan seperti optimalisasi peran pecalang dan desa adat sebagai langkah preventif terhadap aksi kriminal dan kekerasan. Pada sektor kepolisian telah dibangun dan dikembangkan *Foreigners Community Club* oleh Kantor Polisi Pariwisata Kuta sebagai bentuk *soft approach* polisi terhadap wisatawan. Fenomena alienasi dari pelaku kekerasan pada sektor pariwisata telah bertransformasi menjadi perilaku destruktif yang sangat berbahaya. Hal ini

mengacu pada hubungan resiprokal antara jaminan rasa aman dan ancaman yang merupakan produk dari manusia. Maka kerangka konsep keamanan manusia (*human security*) dapat memberikan perlindungan terhadap setiap sisi kehidupan individu termasuk faktor sosio-ekonomi pariwisata. Konsep ini akan memberi dampak timbal balik antara penyedia dan penikmat pariwisata dalam menghadirkan situasi aman dan nyaman. Sebagaimana pariwisata merupakan industri yang paling efektif pada masa damai, maka peningkatan sektor keamanan dan keselamatan pariwisata Bali akan mendorong terwujudnya perdamaian yang positif.

Daftar Pustaka

Buku

- Ariana, Nyoman, 2017, *Penelusuran Wisata Damai Monumen Ground Zero Kuta Bali*, Denpasar: Pustaka Larasan
- Ezmir, 2010, *Metotologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fromm, Erich. 1955, *Masyarakat yang Sehat*, terj "The Sane Society", Thomas Bambang Murtianto, Jakarta: Yayasan Obor.
- Hassan, Shadily, 1991, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtihar Baru.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pertahanan
- Kordić, Ninela, dkk, 2015, *Safety and Security as Factors of Tourism Destination Competitiveness*, Serbia: Singidunum University, Belgrade.
- Kôvári, István & Krisztina Zimányi. 2011. *Safety and Security in The Age of Global Tourism (The changing role and conception of Safety and Security in Tourism)*. Budapest: Agroinform Publishing House.
- Martin, Mary and Taylor Owen (editor), 2014, *Routledge Handbook of Human Security*, New York: Routledge.
- Moloeng, Prof. Dr. Lexy J., 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant, 2013, *National Security Policy (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pizam, Abraham & Yoel Mansfeld. 2006. *Toward a Theory of Tourism Security (in book Tourism, Security and Safety: From Theory to Practice: First Edition)*.
- Praditya, Yosua, 2016, *Keamanan di Indonesia*, Depok: Nadi Pustaka.
- Program Peace through Development & Institut Titian Perdamaian, 2012, *Buku Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, Jakarta: BAPPENAS.
- Sarbini, 2018, *Filsafat Pariwisata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutikna, Nana, 1996, *Keterasingan Manusia (Alienasi) menurut Erich Fromm*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.
- UNDP, 1994, *Human Development Report*, New York: Oxford Oxford University Press
- United Nation World Tourism Organization (UNWTO), 2013, *International Handbook on Tourism and Peace*. Austria: Drava Verlag

Jurnal

- Anom, I Putu, dkk 2017, "Turismemorfosis: Tahapan Selama Seratus Tahun Perkembangan dan Prediksi Pariwisata Bali", dalam *Metamorfosis Pariwisata Bali (Tantangan Membangun Pariwisata Berkelanjutan)*, Denpasar: Pustaka Larasan
- Boxill, Ian, 2012, "Linking tourism security to national security: A brief comment on the implications of the Christopher Coke Saga", *Worldwide Hospitality and Tourism* Vol. 4 No. 1, 2012pp. 26-31 Emerald Group Publishing Limited 1755-4217 DOI 10.1108/17554211211198561.
- Carmignani, Fabrizio & Susanne Becken, 2016, "Does Tourism Lead to Peace?", *Journal Annals of Tourism Research*, 61, Australia
- Gede Indra Pramana, "Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan di Bali", *Jurnal Lakon* Vol. 1 No. 1 Mei 2012, Magister Kajian Sastra dan Budaya, Universitas Airlangga hlm. 14.

- Kowert, Paul and Jeffrey Legro, 1996, "Norms, Identity and Their Limits: A Theoretical Reprise" dalam Peter J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, (New York: Columbia University Press, 1996)
- Mahagangga, I Gusti Agung Oka, dkk, "Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan di Bali (Kajian Awal Kriminalitas Pariwisata)", *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm. 97-105.
- Malik, Farmawaty, "Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali", *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016.
- Sokov, Ilya, 2018, "Human Security as a Universal Value", *Journal of Human Security*, Vol. 8 Issue 1, 2018
- Suharto, "Studi tentang Keamanan dan Keselematan Pengunjung Hubungannya dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)", *Jurnal Media Wisata*, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2016
- Website**
- Anonim, "Stability Operations and Support Operations" dalam,
<https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-07/fm3-07.pdf> diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 22:32 WIB.
- Gede Prama, "Shanti Shanti Shanti" dalam,
<https://www.belkedamaian.org/e-books/2016/12/28/e-book-shanti-shanti-shanti-menemukan-tuhan-di-dalam-diri.html> diakses pada 2 Desember 2018, Pukul 22:09 WIB.
- Watimena, Reza A.A. "Terorisme dan cinta yang gagal", dalam <https://rumahfilsafat.com/2010/10/13/terorisme-dan-cinta-yang-gagal/> diakses pada 2 Juli 2018 Pukul 21.00 WIB.